



Judul : KPU wajib lindungi data dan hak publik
Tanggal : Jumat, 01 Desember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

KPU Wajib Lindungi Data dan Hak Publik

KPU mesti cepat menginvestigasi dan mengumumkan dengan transparan. Data dan hak publik mesti dilindungi.

YAKUB PRYATAMA WIJAYAATMAJA
yakub.p@mediaindonesia.com

PEMBOBOLAN situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berdampak pada bocornya data yang identik dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204,8 juta lebih merupakan perkara serius yang tak bisa dianggap enteng.

Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Gus Imin menengarai serangan siber terhadap KPU tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis yang ingin mengganggu pesta demokrasi lima tahunan Indonesia.

"Ya ini menunjukkan keteledoran, kita harus kontrol terus KPU karena ini menunjukkan ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu," ujar Gus Imin di sela kampanye di Glodok, Jakarta Barat, kemarin.

Ia memang tidak menerangkan se-

cara spesifik apa yang dimaksud dengan upaya sistematis itu. Namun, jika merujuk pada pendapat sejumlah ahli siber, pembobolan data itu memang bisa digunakan untuk menciptakan gangguan terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Ketua DPR Puan Maharani menilai kebocoran data pemilih membuka celah bagi penipuan identitas dan aktivitas kriminal lain yang dapat merugikan warga. Mulai manipulasi untuk kepentingan politik tertentu hingga mengancam integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, kata dia, dapat menimbulkan prasangka di antara pihak terkait yang dapat membuat kondusivitas pelaksanaan pemilu terganggu. "Maka penting sekali investigasi lebih lanjut dari isu kebocoran ini dan langkah-langkah peningkatan pengamanan data. Selain demi keamanan data pribadi masyarakat dan terjaminnya informasi soal DPT, juga agar tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan pemilu," beher Puan.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera juga mengingatkan agar kebocoran data pemilih tidak disepelekan. "Jangan anggap sepele, ini serius. KPU mesti menginvestigasi dan mengumumkan dengan transparan. Publik bukan hanya mesti dilindungi data nya, tetapi juga haknya," tegasnya.

Bawaslu turun tangan

Pakar forensik digital Universitas Islam Indonesia Yudi Prayudi menjelaskan kebocoran data pemilih memiliki beberapa potensi risiko serius terhadap integritas pemilu. Risiko itu antara lain mencakup manipulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara, penipuan pemilih, dan bahkan dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional.

Karena itu, ia menyeru KPU wajib segera melakukan audit keamanan serta pemenuhan standar keamanan informasi segera. "Audit tidak hanya dilakukan kepada pihak internal, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang berinteraksi langsung dengan sumber data atau mendapat akses terhadap sumber data," kata Yudi di Yogyakarta, kemarin.

Selain itu, ia juga mendesak segera dilakukan *review* ulang tata kelola keamanan informasi, evaluasi menyeluruh sistem tata kelola keamanan data, dan rekomendasi perbaikan pencegahan kebocoran.

Pada kesempatan terpisah, anggota KPU Idham Holik menjamin *file* DPT yang telah ditetapkan KPU pada 2 Juli 2023 dalam kondisi aman. Mulai Desember 2023, KPU bakal mencetak DPT tersebut dan didistribusikan ke tiap tempat TPS. "*File* dalam kondisi aman dan siap cetak. Insya Allah proses pemungutan suara 14 Februari 2024 berjalan lancar," tandasnya.

KPU saat ini juga telah menonaktifkan akun-akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.

Sementara itu, Bawaslu bakal turun tangan untuk menelusuri dugaan bocornya data pemilih milik KPU. Berdasarkan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberi hak untuk memegang data tersebut dari KPU. "Bawaslu akan melakukan penelusuran terkait dengan informasi itu," kata anggota Bawaslu Puadi saat dikonfirmasi, kemarin. (Sru/Tri/AU/Ant/X-3)